

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari analisis di atas, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terdapat kekhususan yaitu penyelidikan dan penyidikan diusahakan dilakukan oleh Polisi Penyidik Wanita agar bisa lebih mengerti jiwa anak. Aparat Penegak Hukum dibantu oleh Balai Pemasyarakatan dan hasilnya ditulis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pada proses penuntutan, surat dakwaan harus dibuat sesederhana mungkin. Pada proses persidangan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) untuk menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Terdakwa (anak) didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Masih ada perbedaan pendapat antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan atau penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Putusan Hakim yaitu terdakwa (anak) dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

2. Hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates yaitu:
 - a. Masih ada penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kesusilaan yang pelakunya anak dilakukan oleh penyidik yang belum mempunyai banyak pengalaman dalam melakukan penyidikan Anak
 - b. terbatasnya sarana dan prasarana, misalnya ruangan khusus untuk Sidang Anak.
 - c. dalam pelaksanaan persidangan, korban yang sebagian juga masih anak-anak, bersifat kurang kooperatif karena tidak mau menceritakan dengan jujur apa yang dialami
 - d. masih ada perbedaan pendapat antara Hakim dan Jaksa tentang penerapan atau penjatuhan hukuman
 - e. pendampingan Lembaga Sosial yang tidak bisa maksimal untuk mendampingi anak dalam Sidang Anak.

B. Saran

1. Peran pendamping dari lembaga sosial yang memahami jiwa anak dan orang tua akan sangat membantu dalam memperoleh alat bukti materiil terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Hendaknya aparat penegak hukum yang menangani perkara Anak Nakal, menerima atau mengikuti pendidikan khusus berupa penataran/lokakarya yang berkaitan perlindungan anak atau hal-hal

yang berkaitan dengan hak-hak anak agar aparat penegak hukum dapat menjiwai dan memahami anak.

3. Koordinasi sejak awal hendaknya dilakukan oleh penyidik, demikian pula terhadap Penuntut Umum hendaknya selalu mengikuti perkembangan penyidikan selanjutnya melakukan koordinasi kepada pengadilan agar diperoleh bukti-bukti yang dapat memperkuat pendapat tersebut dan akhirnya dalam melakukan penuntutan dan penjatuhan putusan dapat memberikan keadilan di masyarakat dan yang paling penting adalah persamaan pendapat terhadap pasal yang dijatuhkan kepada pelaku.
4. Hendaknya ada ruangan khusus untuk melakukan Sidang Anak agar anak terhindar dari kontak dengan orang lain yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat

- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

